

Dampak Tata Kelola Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nuna Siti Zenab ^{1*}, Aceng Kurniawan ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia.

Email: nuna10221027@digitechuniversity.ac.id ^{1*}, acengkurniawan@digitechuniversity.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 30 Januari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 25 Februari 2025; Diterima 20 Maret 2025; Diterbitkan 1 April 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Zenab, N. S., & Kurniawan, A. (2025). Dampak Tata Kelola Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 1059–1066. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3973>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tata kelola perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Tata kelola perusahaan yang baik diyakini dapat meminimalisir praktik *Tax Avoidance* yang merugikan negara dan menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2023. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara berbagai variabel tata kelola perusahaan, seperti Independent Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committees, serta Audit Quality dengan tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas tata kelola perusahaan dan *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi dan tata kelola yang lebih baik cenderung memiliki tingkat *Tax Avoidance* yang lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan tata kelola yang buruk lebih rentan terhadap praktik *Tax Avoidance*. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana penerapan tata kelola yang baik dapat mengurangi *Tax Avoidance*, serta memberikan implikasi bagi kebijakan perpajakan dan praktik bisnis yang beretika di Indonesia.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan; *Tax Avoidance*; Transparansi; Perusahaan Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the impact of corporate governance on *Tax Avoidance* in Indonesian companies. Good Corporate Governance is believed to be able to minimize *Tax Avoidance* practices that are detrimental to the state and create a more transparent and accountable business climate. In this study, data were obtained from industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2021-2023. The method used is regression analysis with a quantitative approach to test the relationship between various corporate governance variables, such as Independent Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committees, and Audit Quality, with the level of *Tax Avoidance* carried out by companies. The results of the study indicate that there is a significant influence between the quality of corporate governance and *Tax Avoidance*. Companies with higher levels of transparency and better governance tend to have lower levels of *Tax Avoidance*. Conversely, companies with poor governance are more susceptible to *Tax Avoidance* practices. This study contributes to the understanding of how the implementation of good governance can reduce *Tax Avoidance*, as well as provide implications for tax policy and ethical business practices in Indonesia.

Keyword: Corporate Governance; *Tax Avoidance*; Transparency; Indonesian Companies.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Andriyani, Meiranti, & Mahpudin, 2021). Sebagai sumber pendapatan utama, pajak digunakan untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Srimindarti *et al.*, 2022). Namun, praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena mengurangi potensi penerimaan pajak negara (Desyana & Yanti, 2020). Meskipun penghindaran pajak sering dianggap sebagai strategi sah yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak, dampaknya dapat merugikan perekonomian negara (Kovermann & Velte, 2019). Fenomena ini tercermin dalam sejumlah kasus di Indonesia, seperti yang terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Adaro Energy Tbk, yang menggunakan teknik transfer pricing untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Tempo.com, 2019). Praktik semacam ini mengindikasikan adanya celah dalam regulasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara optimal. Dalam hal ini, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Tata kelola yang baik diyakini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang efektif terhadap aktivitas manajerial. Elemen-elemen seperti Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan (Dita Jayanti, 2024). Namun, efektivitas mekanisme tata kelola ini sering kali bervariasi bergantung pada kondisi dan struktur kepemilikan perusahaan (DeFond & Zhang, 2014). Data menunjukkan bahwa sektor industri di Indonesia menyumbang sebagian besar penerimaan pajak penghasilan non-migas, namun sektor ini juga rentan terhadap praktik penghindaran pajak (Dini, 2019). Hal ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara tata kelola perusahaan dan tingkat penghindaran pajak di sektor ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dapat mengurangi intensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, meskipun masih terdapat celah dalam regulasi yang memungkinkan praktik tersebut terjadi (Meita, Wulandari, Srimindarti, & Ali Ma'sum, 2023). Masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana tata kelola perusahaan memengaruhi tingkat penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan Indonesia. Praktik penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis dan merusak reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi akademisi, praktisi bisnis, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor industri Indonesia serta mengurangi dampak negatif dari praktik penghindaran pajak.

Teori Agensi menjelaskan bahwa dalam hubungan antara prinsipal dan agen, pemegang saham (prinsipal) memberikan wewenang kepada manajer (agen) untuk bertindak demi kepentingan mereka, dengan manajer bertanggung jawab untuk mengikuti instruksi pemegang saham (Sarah Troylita & Harti Budi Yanti, 2024). Konflik keagenan terjadi ketika pemegang saham menentang penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dianggap sebagai manipulasi laporan keuangan, sementara manajer berusaha menekan kewajiban pajak untuk mencapai nilai perusahaan yang lebih tinggi (Adityamurti & Ghazali, 2017). *Tax Avoidance* adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan negara, meskipun praktik ini dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi negatif jika dilakukan secara berlebihan (Annisa, Aji, & Gehad, 2024). Perusahaan multinasional sering menggunakan perencanaan pajak global dengan mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak (*tax havens*) untuk menghindari pajak yang lebih tinggi di negara asal (Francois & Vicard, 2023). *Corporate governance* merujuk pada struktur yang mengawasi dan mengelola bisnis, melibatkan interaksi antara pimpinan perusahaan, pemegang saham, dan dewan direksi, dengan tujuan memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Pieritsz, 2021; Yesica, Sitorus, & Purwanto, 2020). Unsur-unsur seperti Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit memainkan peran kunci dalam

RESEARCH ARTICLE

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan (Zahrawani & Sholikhah, 2021). Komisaris Independen berfungsi memberikan pengawasan objektif terhadap pengelolaan perusahaan, yang dapat mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan (Kasan K Suantha, 2023; Pratami *et al.*, 2021), serta berperan dalam pengawasan kewajiban perpajakan (Febriyanto & Widiyanto, 2023). Kepemilikan Institusional, atau Institutional Ownership, merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga institusi dalam perusahaan dan mendorong pengawasan manajerial yang lebih ketat, yang pada gilirannya mengurangi potensi penghindaran pajak (Saptowinarko Prasetyo, 2024; Tarjo, 2008). Komite Audit, yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar dan bebas dari manipulasi, serta berkontribusi pada penerapan *Good Corporate Governance* (Biofarma, 2023). Kualitas Audit (*Audit Quality*) mengacu pada kualitas audit yang dilakukan oleh auditor independen, yang dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan mengurangi praktik manajemen laba serta *Tax Avoidance* (LPP, 2025; DeAngelo, 1981). Keberadaan Komisaris Independen terbukti dapat mengurangi penghindaran pajak, dimana semakin banyak jumlah Komisaris Independen, semakin rendah tingkat *Tax Avoidance* (Widodo & Anggraini, 2024), meskipun ada juga temuan yang menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan dalam beberapa situasi (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Begitu juga dengan Kepemilikan Institusional yang secara signifikan mengurangi penghindaran pajak, terutama dalam perusahaan milik negara (Tarmizi & Perkasa, 2022; Chasbiandani, Eka, & Nudiya, 2021). Komite Audit juga terbukti berperan dalam mengurangi *Tax Avoidance* melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan perpajakan (Novi Susilowati & Andi Kartika, 2023), meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran Komite Audit yang besar tidak selalu mengoptimalkan efektivitasnya dalam mencegah penghindaran pajak (Khusna & Sihono, 2024). Terakhir, kualitas audit juga memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Khusna & Sihono, 2024; Garda Wijaya, 2023), sementara auditor dengan dedikasi dan keahlian lebih rendah, seperti yang terdapat pada KAP non-Big Four, lebih memungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak (Yunawati, 2021; Erawati & Susanti, 2023).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023, yang berasal dari sektor industri. Penelitian ini mencakup tiga subsektor industri, yaitu Industrial Goods, Industrial Services, dan Multi Sector Holding.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jml. Perusahaan
1	Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di BEI 2021-2023	50
3	Perusahaan yang tidak menyediakan laporan keuangan	-8
4	Perusahaan yang tidak ada laporan audit	-5
Total Perusahaan yang di amati		37
Pengamatan selama 3 Tahun (37x3)		111

Tabel 2. Variabel Penelitian

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	<i>Independent Commissioner</i> (IC)	Independen	$\frac{\text{Jumlah Independent Commissioner}}{\text{Jumlah Anggota dewan komisaris}} \times 100\%$	Rasio

RESEARCH ARTICLE

2	<i>Institutional Ownership (IO)</i>	Independen	$\frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$	Rasio
3	<i>Audit Committee (AC)</i>	Independen	$\frac{\text{Jumlah Audit Committee diluar Independent Commissioner}}{\text{Jumlah Anggota Audit Committee}}$	Nominal
4	<i>Audit Quality (AQ)</i>	Independen	Variabel dummy, nilai 1 jika tauditor spesial, 0 jika auditor tidak spesial	Nominal
5	<i>Tax Avoidance (TA)</i>	Dependen	$ECTR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{PreTax Income}}$	Rasio

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan statistik deskriptif, peneliti dapat mengidentifikasi pola, distribusi, serta variasi dalam variabel-variabel yang terkait dengan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Indipendent Commissioner (IC)	111	0.20	1.00	0.4515	0.15598
Institutionak Ownership (IO)	111	0.28	0.91	0.6089	0.16091
Audit Committee (AC)	111	0.00	1.50	0.7751	0.25078
Audit Quality (AQ)	111	0.00	1.00	0.4505	0.49980
Tax Avoidance (TA)	111	0.01	0.63	0.2184	0.15004
Valid N (listwise)	111				

3.1.2 Uji Statistik

Pengujian statistik dilakukan untuk memastikan validitas dan keandalan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengevaluasi distribusi data residual. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,177, yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinieritas dilakukan dengan mengukur nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF di bawah 10, dengan *Independent Commissioner* (IC) sebesar 1,993, *Institutional Ownership* (IO) sebesar 2,155, *Audit Committee* (AC) sebesar 2,203, dan *Audit Quality* (AQ) sebesar 1,197. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser untuk memastikan bahwa varians error dalam model regresi bersifat konstan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi ini layak untuk analisis lebih lanjut. Terakhir, uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi adanya hubungan antar residual dalam model regresi. Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,400, yang berada di antara batas bawah (-2) dan batas atas (+2), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	Zero-order	
Indipendent Commissioner (IC)	-0.437	-0.852	0.372
Institutionak Ownership (IO)	-0.401	-0.854	0.342
Audit Committee (AC)	-0.229	-0.799	0.183
Audit Quality (AQ)	-0.063	-0.375	0.024
Total Effect			0.921

Dapat dilihat bahwa setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen, *Tax Avoidance*, dengan kontribusi tertentu pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Independent Commissioner (IC) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 37,2%, Institutional Ownership (IO) sebesar 34,2%, *Audit Committee* (AC) sebesar 18,3%, dan *Audit Quality* (AQ) sebesar 2,4%. Secara keseluruhan, keempat variabel independen ini memberikan dampak sebesar 92,1% terhadap *Tax Avoidance*, sementara faktor-faktor lain menyumbang 7,9%, yang menunjukkan bahwa keempat variabel independen tersebut secara bersama-sama memainkan peran penting dalam menjelaskan perbedaan tingkat *Tax Avoidance*.

Tabel 5. Uji signifikansi Parsial

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	Kesimpulan
Indipendent Commissioner (IC)	-11.348	-1.983	0.000	Signifikan
Institutionak Ownership (IO)	-10.013	-1.983	0.000	Signifikan
Audit Committee (AC)	-5.649	-1.983	0.000	Signifikan
Audit Quality (AQ)	-2.118	-1.983	0.001	Signifikan

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (Uji t) yang dilakukan terhadap empat hipotesis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Untuk Hipotesis I mengenai pengaruh Independent Commissioner terhadap *Tax Avoidance*, nilai thitung yang diperoleh sebesar -11,348 lebih kecil dari nilai ttabel -1,983 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga H1 diterima, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Independent Commissioner dan *Tax Avoidance*. Hipotesis II yang menguji pengaruh Institutional Ownership terhadap *Tax Avoidance* juga menunjukkan hasil signifikan dengan nilai thitung -10,013 yang lebih kecil dari -1,983 dan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti H1 diterima dan Institutional Ownership berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Pada Hipotesis III mengenai pengaruh *Audit Committee* terhadap *Tax Avoidance*, nilai thitung yang diperoleh sebesar -5,649 lebih kecil dari ttabel -1,983 dengan signifikansi 0,000, yang menunjukkan keterlibatan *Audit Committee* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Terakhir, Hipotesis IV yang menguji pengaruh *Audit Quality* terhadap *Tax Avoidance* menghasilkan nilai thitung -2,118, yang lebih kecil dari -1,983 dengan tingkat signifikansi 0,001, sehingga H1 diterima, menunjukkan bahwa *Audit Quality* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Secara keseluruhan, hasil uji ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diuji—Independent Commissioner, Institutional Ownership, *Audit Committee*, dan *Audit Quality*—memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3.2 Pembahasan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Independent Commissioner* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dengan kontribusi sebesar 37,2%. Semakin besar proporsi *Independent Commissioner* dalam struktur manajemen, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Independent Commissioner* berperan penting dalam meningkatkan

RESEARCH ARTICLE

pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan, sehingga membatasi ruang untuk melakukan *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan jumlah *Independent Commissioner* yang lebih tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait pajak, mengingat tanggung jawab mereka untuk menjaga reputasi dan integritas perusahaan. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa *Independent Commissioner* berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Lanis, Richardson, Liu, & McClure, 2019). Selain itu, hasil ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa *Independent Commissioner* cenderung menentang penghindaran pajak agresif dan lebih fokus pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Novrys Suhardianto & Risandy Meda Nurjanah, 2021). Selanjutnya, hasil uji juga menunjukkan bahwa *Institutional Ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dengan kontribusi sebesar 34,2%. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak, berkat pengawasan yang lebih ketat dari investor institusional.

Penelitian ini mendukung temuan Nugroho *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang lebih besar mengurangi motivasi perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*, serta temuan Mokoagow *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa pengawasan lebih ketat dari investor institusional dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan praktik pajak yang berisiko. Hasil uji berikutnya menunjukkan bahwa keberadaan *Audit Committee* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dengan kontribusi sebesar 18,3%. Perusahaan dengan *Audit Committee* yang kuat dan kompeten cenderung lebih jarang terlibat dalam praktik *Tax Avoidance*, karena adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Hal ini mendukung teori pengawasan yang menyatakan bahwa *Audit Committee* yang independen dan kompeten dapat mengurangi kebijakan pajak agresif dengan memastikan transparansi dan kepatuhan hukum yang lebih baik. Terakhir, hasil uji menunjukkan bahwa *Audit Quality* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dengan kontribusi sebesar 2,4%. Perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan kualitas tinggi cenderung lebih jarang terlibat dalam praktik penghindaran pajak, karena pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan. Penelitian ini mendukung temuan Jeong & Nedy (2019) yang menunjukkan bahwa auditor berkualitas tinggi dapat mengurangi motivasi perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*, serta temuan Indriani & Ramli (2024) yang menunjukkan bahwa auditor yang dihormati dan berkompeten, seperti yang terdapat pada KAP Big 4, dapat mencegah praktik *Tax Avoidance* yang lebih agresif dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap fenomena yang ada, serta penjelasan teori-teori yang disampaikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor tata kelola perusahaan seperti *Independent Commissioner*, *Institutional Ownership*, *Audit Committee*, dan *Audit Quality* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Independent Commissioner* berperan penting dalam pengawasan laporan keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan, meskipun pengaruhnya masih terbatas, dengan kontribusi sebesar 37,2%. Begitu juga dengan *Institutional Ownership* yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan, namun kontribusinya masih sebesar 34,2%. *Audit Committee* memiliki pengaruh yang lebih kecil, hanya sebesar 18,3%, yang menunjukkan bahwa meskipun peranannya penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, meskipun *Audit Quality* memiliki pengaruh yang paling kecil, yakni 2,4%, namun tetap memiliki peranan penting dalam menjaga integritas laporan keuangan dan meminimalkan praktik manipulasi pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada periode waktu yang terbatas, yakni hanya mencakup tahun 2021 hingga 2023, serta sampel yang terbatas pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini membuat hasil penelitian tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk seluruh sektor atau periode yang lebih panjang. Selain itu, faktor-faktor eksternal

RESEARCH ARTICLE

seperti kebijakan pemerintah dan sistem pajak yang berlaku di Indonesia juga belum diperhitungkan secara mendalam dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan temuan ini dengan menggunakan sampel yang lebih luas, baik dari sektor yang berbeda maupun periode yang lebih panjang, guna mendapatkan hasil yang lebih representatif. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat mengeksplorasi dampak kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel terhadap praktik *Tax Avoidance*, serta mempertimbangkan variabel eksternal lain yang mungkin berpengaruh. Juga disarankan untuk memeriksa secara lebih mendalam hubungan antara elemen-elemen tata kelola perusahaan dengan taktik *Tax Avoidance*, terutama di sektor industri yang lebih luas, guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi praktik bisnis di Indonesia.

5. Referensi

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38, 100304. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304>.
- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124-135.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of accounting and economics*, 3(3), 183-199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1).
- DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2-3), 275-326. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002>.
- Desyana, C., & Yanti, L. D. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub makanan & minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. *ECo-Fin*, 2(3), 124-138. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.382>.
- Dini, F. M. (2019). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2015-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Dita, J. (2024). Pengaruh tata kelola perusahaan dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(3), 78-90. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i3.457>.
- Febriyanto, V., & Widiyanto, T. (2023). Analisis prediksi kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(3), 981-992. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i3.699>.
- Francois, M., & Vicard, V. (2023). Tax avoidance and the complexity of multinational enterprises.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165-176.

RESEARCH ARTICLE

- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>.
- Muhammad, M., Rahmawati, S. A., Izzalqurny, T. R., & Ferdiansyah, R. A. (2023). Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja ESG yang Berkelanjutan.
- Permatasari, D. A. D., & Muniroh, H. (2024). Determinants of tax avoidance in manufacturing companies. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(2), 315–323. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i2.336>.
- Pieritsz, L. (2021). Peran tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manajemen laba. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i2.65908>.
- Pratami, Y., Syaifora, L., Basriani, A., & Yuliza, M. (2021). The Role Of The Independent Commissioner In Moderating CEO Power On Company Performance. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(4). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i4.3726>.
- Saptowinarko Prasetyo, M. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan corporate social responsibility. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 140–148. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.277>.
- Sarah Troylita, & Harti Budi Yanti. (2024). Pengaruh tata kelola perusahaan, intensitas modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 845–854. <https://doi.org/10.25105/05j5xx15>.
- Srimindarti, C., W, C. A., O, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). Pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghindaran. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 114–125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i11417.2022>.
- Suantha, K. K., & Hendrayati, S. M. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pada Wedding Organizer Di Kota Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 1(7), 360-369.
- Yesica, Sitorus, T., & Purwanto, E. (2020). Pengaruh tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. *Journal of Business & Applied Management*, 13(2), 191. <https://doi.org/10.30813/jbam.v13i2.2356>.
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis penerapan good corporate governance (GCG) dan pengaruhnya terhadap kinerja lembaga bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1799-1818. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>.